

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA ORO-ORO OMBO KOTA BATU

Community Participation in Village Development Planning Deliberation (MUSRENBANGDES) in Oro-Oro Ombo Village Batu City

Fransiska Hilda Murniyati^{1*}
Ignatius Adiwidjaja¹

¹Universitas Tribhuwana Tunggaladewi,
Malang

*corresponding author:
email: fransiskahildayati642@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berlangsung pada tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan, meskipun tingkat keterlibatan pada setiap tahapan belum merata. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah desa, komunikasi yang terbuka, dan budaya gotong royong, sedangkan faktor penghambat berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Musrenbangdes dan keterbatasan waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan pemerintah desa, modal sosial, dan literasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Kata Kunci:
Partisipasi masyarakat
Musrenbangdes
Pemerintah Desa

Keywords:
Community participation
Musrenbangdes
Village Government

Abstract

This study aims to analyze community participation in the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in Oro-Oro Ombo Village, Batu City, and to identify the factors supporting and hindering such participation. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings indicate that community participation occurred during decision-making, implementation, monitoring and evaluation, and the utilization of development outcomes, although the level of participation varied across stages. Supporting factors include the village government's commitment, open communication, and a strong culture of mutual cooperation, while limited public understanding of the Musrenbangdes process and time constraints remain the primary barriers. The study concludes that effective community participation is influenced by the interaction of institutional capacity, social capital, and public literacy in village development planning.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submit: 22-05-2026

Accepted: 17-07-2026

Published: 20-07-2026

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum resmi yang mempertemukan pemerintah

desa dan masyarakat dalam menyusun prioritas pembangunan. Melalui Musrenbangdes, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan program yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, kualitas pembangunan desa sangat

dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan (Purwaningsih, 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Keterlibatan tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga menghasilkan perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Burke (2004) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting untuk memperkuat demokrasi lokal karena memberikan ruang bagi warga untuk memengaruhi arah kebijakan pembangunan secara langsung.

Meskipun demikian, implementasi Musrenbangdes di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman mengenai mekanisme Musrenbangdes, keterbatasan waktu masyarakat, serta dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan (Eko, 2015). Penelitian Handika (2021) juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan hasil perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, di mana forum Musrenbangdes telah dilaksanakan secara rutin, namun keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan masih belum merata. Sebagian masyarakat aktif menyampaikan aspirasi, sedangkan sebagian lainnya cenderung pasif sehingga representasi kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip partisipatif yang diharapkan dalam

Musrenbangdes dengan praktik pelaksanaannya di tingkat desa.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan atau tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes, sedangkan kajian yang menganalisis partisipasi masyarakat secara komprehensif mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga pemanfaatan hasil pembangunan masih relatif terbatas. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan Theresia Aprillia (2014), sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbangdes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena partisipasi masyarakat berdasarkan kondisi yang berlangsung secara alamiah serta menjelaskan makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap proses perencanaan pembangunan desa (Sugiyono, 2018; Sukmadinata, 2011).

Penelitian dilaksanakan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berdasarkan tahapan pengambilan keputusan,

pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Fokus tersebut mengacu pada konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Theresia Aprillia (2014).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Musrenbangdes. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan pembangunan desa, berita acara Musrenbangdes, profil desa, laporan kegiatan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan Musrenbangdes. Informan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa yang membidangi perencanaan pembangunan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat yang mengikuti Musrenbangdes. Teknik ini dipilih agar informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian dan mampu menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan Musrenbangdes dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai bentuk partisipasi masyarakat, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa notulen Musrenbangdes, dokumen perencanaan pembangunan, foto kegiatan, serta dokumen administratif lainnya.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*),

kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Analisis dilakukan secara berulang sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang konsisten.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama. Penerapan triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian sehingga temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2018).

HASIL

Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes

Di Desa Musrenbang, partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan aktif warga setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan desa untuk mencapai konsensus demi kemajuan desa.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu dilaksanakan melalui berbagai forum musyawarah seperti Musrenbangdes, musyawarah desa, musyawarah dusun, serta forum RT/RW. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kebutuhan pembangunan desa. BPD juga berperan dalam menjaring aspirasi masyarakat hingga tingkat dusun melalui RT/RW agar lebih banyak warga dapat terlibat dalam proses perencanaan (wawancara Bapak Suliamat, 24 September 2025; Bapak Supriyono, 26 September 2025; Bapak Anam, 26 September 2025).

Proses pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT/RW, dusun, hingga tingkat desa melalui musyawarah. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh

agama, serta unsur kelembagaan desa lainnya. Perencanaan pembangunan tidak hanya berasal dari pemerintah desa, tetapi juga bersumber dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum musyawarah dan kemudian disusun menjadi dokumen perencanaan desa (wawancara Bapak Suliamat, 24 September 2025; Bapak Supriyono, 26 September 2025; Bapak Aman, 26 September 2025).

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat masih belum merata. Hanya sebagian warga yang aktif memberikan saran atau usulan dalam forum musyawarah, sedangkan sebagian lainnya cenderung pasif dan lebih banyak mendengarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif (wawancara Bapak Suliamat, 20 April 2026; Bapak Supriyono, 20 April 2026; Bapak Anam, 20 April 2026).

Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki akses terhadap forum resmi untuk menyampaikan aspirasi, seperti Musrenbangdes dan rapat desa. Masyarakat juga dilibatkan mulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan, hingga evaluasi pembangunan. Partisipasi ini terlihat dari kehadiran dalam rapat, diskusi, serta pemberian saran dan tanggapan terhadap program pembangunan desa (wawancara Ibu Ani Krismawati, 28 September 2025; Bapak Supardi, 28 September 2025; observasi peneliti, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan di Desa Oro-Oro Ombo telah berjalan secara partisipatif melalui forum musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah desa berperan aktif sebagai fasilitator dalam membuka ruang partisipasi, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat,

sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi dalam Pelaksana Kegiatan

Pemerintahan Desa Oro-Oro Ombo menggunakan berbagai taktik, termasuk pendidikan, komunikasi, dan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Bapak Suliamat, Kepala Pemerintahan, masyarakat didorong untuk terlibat melalui saling membantu, pelayanan masyarakat, dan menyampaikan saran melalui perkumpulan lingkungan (RT/RW), yang kemudian dibahas dalam rapat desa (wawancara, 24 September 2025). Selain itu, dewan desa menggunakan forum lingkungan untuk mengumpulkan keinginan masyarakat dan secara aktif mensosialisasikan program-program (wawancara, 26 September 2025).

Masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan, terutama dengan memberikan saran dan ikut serta dalam diskusi. Perkumpulan lingkungan (RT/RW) menerima saran dan ide dari masyarakat, yang kemudian dibahas dalam forum publik desa. Keterlibatan langsung dalam inisiatif pembangunan seperti pelayanan masyarakat dan kerja sama juga menunjukkan partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa selain sebagai penerima manfaat (wawancara, 24–26 September 2025).

Proyek pembangunan fisik seperti pembangunan fasilitas umum dan perbaikan jalan dapat menunjukkan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, masyarakat mengawasi pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan persyaratan dan tujuan yang telah ditetapkan (pengamatan lapangan;

wawancara dengan Bapak Supardi dan Ibu Ani Krismawati, 28 September 2025).

Budaya kerja sama yang kuat di dalam masyarakat, komunikasi yang efektif, dan pendidikan dari pemerintah desa merupakan faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat. Klaim para pemimpin desa bahwa pendidikan telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan pembangunan dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif mendukung hal ini (wawancara, 20 April 2026). Namun, ada juga hambatan yang menyebabkan keterlibatan yang tidak merata, seperti kurangnya pemahaman di antara anggota masyarakat tertentu dan pembatasan dalam penyampaian pendapat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Oro-Oro Ombo secara aktif dan sangat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat berperan sebagai agen pertumbuhan dengan menyumbangkan tenaga kerja, ide, dan sumber daya, sementara pemerintah desa memfasilitasi keterlibatan dengan menyediakan forum untuk diskusi, pengajaran, dan koordinasi. Hasilnya, masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis lokal.

Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah desa dan BPD memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan program serta penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa (wawancara Bapak Suliamat, 24 September 2025).

Hasil evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan selama pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah desa menyampaikan bahwa setiap hasil pembangunan selalu dievaluasi untuk mengetahui kekurangan serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Seluruh hasil pembangunan juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi (wawancara Bapak Supriyono, 26 September 2025).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa secara langsung melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan secara berkala, meskipun masih sederhana, guna menilai hasil dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan (wawancara Bapak Suliamat, 20 April 2026). Hal ini menunjukkan adanya kontrol langsung dari pemerintah desa terhadap proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi juga terlihat cukup aktif, terutama melalui keterlibatan dalam kegiatan lapangan seperti gotong royong dan pengawasan langsung pembangunan fisik. Masyarakat juga memberikan masukan atau laporan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat masih lebih dominan pada kegiatan operasional dibandingkan pada pengambilan keputusan strategi (wawancara Ibu Ani Krismawati dan Bapak Supardi, 28 September 2025).

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, seperti keterbatasan waktu, kurangnya informasi, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme evaluasi pembangunan. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata, meskipun sebagian warga tetap aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan (wawancara Bapak Supriyono, 26 September 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi pembangunan di Desa

Oro-Oro Ombo telah berjalan cukup baik dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menciptakan sistem pengawasan yang transparan serta mendorong perbaikan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat juga menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas dan keberhasilan pembangunan desa.

Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Komunikasi terbuka pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Spanduk, pamflet, plakat kegiatan, dan penyebaran informasi melalui pertemuan desa, organisasi lingkungan (RT/RW), dan media lainnya digunakan untuk menyebarkan hasil pembangunan secara luas. Selain itu, dokumen perencanaan dan realisasi anggaran seperti Anggaran Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) dipublikasikan agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti proses pembangunan secara terbuka. Sekretaris Desa, Bapak Supriyono, menjelaskan hal ini, menekankan bahwa masyarakat selalu diberi informasi tentang laporan realisasi anggaran pada akhir setiap tahun.

Percakapan dengan Bapak Sulimat, Kepala Urusan Pemerintahan, mengungkapkan bahwa penggunaan hasil pembangunan merupakan cara lain untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam inisiatif selanjutnya. Pemerintah desa secara aktif mendorong dan menginstruksikan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia, pembinaan, pemberdayaan, dan pembangunan fisik. Hal ini menggambarkan inisiatif untuk mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga keterlibatan dalam setiap program pembangunan berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Bapak Anam, Kepala Pelayanan Publik, mengklarifikasi bahwa meskipun hasil pembangunan telah dikomunikasikan, akses masyarakat terhadap informasi masih perlu ditingkatkan. Untuk menjamin bahwa masyarakat menyadari manfaat menyeluruh dari pembangunan, penyebaran informasi yang lebih luas melalui Gerakan Kesejahteraan Keluarga (PKK), papan pengumuman desa, dan media digital dianggap penting. Hal ini menjamin bahwa transparansi informasi dapat lebih berhasil menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak hanya terbatas pada urusan formal.

Menurut percakapan dengan Ibu Ani Krismawati, hasil pembangunan di Desa Oro-Oro Ombo telah digunakan secara adil dan tidak mengakibatkan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Selama kemajuan didukung oleh pemeliharaan bersama melalui kolaborasi bersama dan penyebaran informasi yang luas, masyarakat dapat sepenuhnya memperoleh manfaat darinya. Sikap ini juga diungkapkan oleh Bapak Supardi, yang menekankan bahwa pemeliharaan bersama sangat penting untuk menjamin bahwa semua penduduk, tanpa kecuali, mendapat manfaat dari kemajuan.

Masyarakat telah menggunakan hasil pembangunan, terutama infrastruktur jalan, untuk membantu kegiatan sehari-hari, menurut temuan para peneliti. Selain meningkatkan aksesibilitas, penggunaan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan fasilitas. Seperti yang terlihat dari partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan dan daya tarik estetika desa, lingkungan yang terawat dengan baik menunjukkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi semuanya menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam penggunaan hasil pembangunan di Desa Oro-Oro Ombo. Masyarakat langsung merasakan manfaat dari hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan pemerintah desa telah secara terbuka dan publik menyebarkan hasil-hasil

tersebut. Dengan menggunakan hasil pembangunan ini, kualitas hidup masyarakat meningkat dan partisipasi mereka dalam inisiatif pembangunan di masa mendatang didorong melalui diskusi, kerja sama, dan kegiatan sosial lainnya, sehingga menghasilkan sinergi jangka panjang antara pemerintah desa dan masyarakat.

Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung dan faktor penghambat adalah dua elemen utama yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh kedua kriteria ini.

Faktor Pendukung

Tingkat kehadiran yang tinggi dari anggota masyarakat dari unsur RT/RW, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan warga yang secara konsisten berpartisipasi dalam setiap forum musyawarah merupakan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, berdasarkan temuan wawancara dan observasi. Hal ini diperkuat oleh penyediaan forum terbuka secara rutin oleh pemerintah desa untuk diskusi, bersama dengan komunikasi dan sosialisasi yang efektif untuk memastikan masyarakat dapat memahaminya. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan didorong oleh budaya kerja sama yang masih kuat. Akibatnya, secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berjalan cukup lancar dan didukung oleh sinergi antara pemerintah desa dan warga.

Faktor Penghambat

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara, penyebab utama hambatan keterlibatan masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu, adalah perbedaan pemahaman masyarakat tentang mekanisme Musrenbangdes, yang membuat beberapa usulan tidak relevan dengan topik diskusi. Selain itu, jadwal warga yang padat dan keterbatasan waktu menyulitkan semua orang untuk bergabung dalam forum diskusi; akibatnya, mayoritas peserta adalah warga yang memiliki waktu luang. Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih setara dan sukses, masih diperlukan lebih banyak sosialisasi dan pemahaman.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Musrenbangdes

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Keberhasilan Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya forum musyawarah, tetapi juga oleh kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, partisipasi masyarakat menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah desa dengan warga. Oleh karena itu, partisipasi tidak dapat dimaknai hanya sebagai kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif dalam memengaruhi arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Oro-Oro Ombo telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui tahapan musyawarah

dusun, rapat tingkat RT/RW, hingga Musrenbangdes di tingkat desa. Mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan berbagai usulan pembangunan yang kemudian dibahas bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur kelembagaan lainnya sebelum ditetapkan sebagai prioritas pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengakomodasi prinsip partisipatif melalui penyediaan ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes tidak sepenuhnya bersifat top-down, tetapi telah mengarah pada proses deliberatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal. Tidak seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif karena keterbatasan waktu, kesibukan pekerjaan, maupun rendahnya pemahaman mengenai mekanisme Musrenbangdes. Akibatnya, partisipasi dalam forum musyawarah masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki waktu luang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan forum belum secara otomatis menghasilkan partisipasi yang inklusif. Dalam konteks tata kelola partisipatif, kualitas partisipasi ditentukan bukan hanya oleh tersedianya ruang musyawarah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh kelompok masyarakat untuk memanfaatkan ruang tersebut secara setara.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Cohen dan Uphoff (1980) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak berhenti pada kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi mencakup keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, Theresia Aprillia (2014) menegaskan bahwa

pembangunan berbasis masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta berperan dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan demikian, keberadaan Musrenbangdes sebagai forum partisipatif harus diikuti oleh mekanisme yang mampu menjamin representasi seluruh kelompok masyarakat agar keputusan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Handika (2021) yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbangdes berpengaruh terhadap kualitas usulan pembangunan yang disampaikan. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda. Apabila penelitian sebelumnya lebih menekankan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa ruang partisipasi sebenarnya telah tersedia melalui berbagai forum musyawarah, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat dalam memahami proses perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, tantangan utama tidak lagi terletak pada penyediaan forum partisipasi, melainkan pada peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut.

Selain berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat Desa Oro-Oro Ombo juga menunjukkan keterlibatan pada tahap pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat berkontribusi melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, serta dukungan tenaga dan sumber daya dalam berbagai program pembangunan desa. Bentuk partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku yang secara langsung mendukung pelaksanaan program yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. Keterlibatan tersebut menjadi indikator adanya tanggung jawab

bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Partisipasi pada tahap pelaksanaan juga memperlihatkan kuatnya modal sosial masyarakat Desa Oro-Oro Ombo. Nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan masih menjadi budaya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Modal sosial tersebut mempermudah koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa intensitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih belum merata. Sebagian masyarakat terlibat secara aktif, sedangkan sebagian lainnya masih bersifat pasif karena keterbatasan waktu maupun kesibukan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun komitmen dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Antonius (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan relatif lebih tinggi dibandingkan pada tahap pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah terlibat dalam aktivitas pembangunan yang bersifat langsung dan nyata dibandingkan dalam proses perencanaan yang memerlukan pemahaman terhadap mekanisme administrasi pembangunan desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas Musrenbangdes tidak hanya membutuhkan forum yang terbuka, tetapi juga strategi peningkatan kapasitas

masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Musrenbangdes di Desa Oro-Oro Ombo telah mengarah pada model pembangunan yang lebih partisipatif melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, kualitas partisipasi masih dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat mengenai mekanisme Musrenbangdes serta kemampuan pemerintah desa dalam menciptakan partisipasi yang lebih inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya forum musyawarah, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam mengelola partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola partisipatif di tingkat desa bergantung pada keseimbangan antara mekanisme kelembagaan yang terbuka dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Keberlanjutan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak berakhir setelah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selesai. Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta memanfaatkan hasil pembangunan secara berkelanjutan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan masyarakat merupakan salah satu bentuk social accountability yang berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel. Oleh karena itu, partisipasi pada tahap pengawasan dan pemanfaatan hasil

pembangunan menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Oro-Oro Ombo telah berpartisipasi dalam kegiatan monitoring pembangunan melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan desa, khususnya pembangunan infrastruktur. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, tetapi juga turut mengawasi kualitas pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrenbangdes, serta memberikan masukan apabila ditemukan kendala di lapangan. Pengawasan tersebut dilakukan baik secara langsung di lokasi pembangunan maupun melalui komunikasi dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan desa sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi masih bersifat informal dan belum dilakukan secara sistematis. Sebagian besar masyarakat melakukan pengawasan berdasarkan kedekatan dengan lokasi pembangunan atau kepentingan langsung terhadap program yang dilaksanakan, sedangkan keterlibatan dalam forum evaluasi masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, keterbatasan waktu, rendahnya pemahaman mengenai mekanisme evaluasi pembangunan, serta akses informasi yang belum merata menyebabkan tidak seluruh masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan masyarakat belum sepenuhnya berkembang sebagai mekanisme evaluasi partisipatif yang terstruktur, tetapi masih didominasi oleh pengawasan berbasis

pengalaman dan kepedulian warga terhadap lingkungan sekitarnya.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Theresia Aprillia (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif sekaligus menjadi media umpan balik (feedback) bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya kesempatan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat dalam memahami mekanisme evaluasi pembangunan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif memerlukan dukungan berupa keterbukaan informasi, komunikasi yang intensif, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ahmad Baihaqi (2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Musrenbangdes berpengaruh terhadap kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pembangunan. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena menemukan bahwa meskipun forum evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, masyarakat tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui kontrol sosial sehari-hari terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan tidak selalu diwujudkan melalui mekanisme formal, tetapi juga berkembang melalui interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.

Selain berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat Desa Oro-Oro Ombo juga menunjukkan keterlibatan yang cukup baik dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berbagai fasilitas

yang telah dibangun, seperti jalan lingkungan, sarana umum, dan infrastruktur pendukung lainnya, dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi. Tidak hanya memanfaatkan hasil pembangunan, masyarakat juga berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara fasilitas tersebut melalui kegiatan gotong royong serta kepedulian terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan sehingga keberlanjutan manfaat pembangunan dapat terus terjaga.

Pemanfaatan hasil pembangunan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendukung berbagai kegiatan sosial di tingkat desa. Manfaat yang dirasakan secara langsung mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan dan meningkatkan motivasi untuk kembali berpartisipasi dalam Musrenbangdes pada periode berikutnya. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang saling memperkuat antara kualitas hasil pembangunan dengan keberlanjutan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat dan kemauan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan berikutnya juga semakin besar.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Pramawati (2024) yang menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan hasil pembangunan dipengaruhi oleh terbatasnya informasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Oro-Oro Ombo telah merasakan manfaat pembangunan dan menunjukkan kepedulian terhadap pemeliharaan hasil pembangunan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa

keberhasilan pemanfaatan hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Semakin besar ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat, semakin tinggi pula rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan telah berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan desa di Desa Oro-Oro Ombo. Meskipun mekanisme monitoring dan evaluasi masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan keterbukaan informasi, masyarakat telah menjalankan fungsi kontrol sosial serta memanfaatkan hasil pembangunan secara bertanggung jawab. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, tetapi juga pada kemampuan membangun rasa memiliki, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Kontribusi penelitian ini mempertegas bahwa pengawasan partisipatif dan pemanfaatan hasil pembangunan merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari pemerintah desa maupun dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keberhasilan Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh tersedianya forum musyawarah, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam

memfasilitasi partisipasi serta kesiapan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan. Oleh karena itu, faktor pendukung dan penghambat perlu dipahami sebagai dua kondisi yang secara simultan memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama partisipasi masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo adalah komitmen pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi melalui penyelenggaraan Musrenbangdes yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Keterbukaan pemerintah desa dalam menerima aspirasi serta pelaksanaan sosialisasi sebelum Musrenbangdes memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Selain itu, budaya gotong royong yang masih kuat menjadi modal sosial yang mendorong masyarakat untuk tidak hanya berpartisipasi dalam proses perencanaan, tetapi juga mendukung pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara kepemimpinan pemerintah desa, komunikasi yang terbuka, dan modal sosial masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang partisipatif.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi kualitas keterlibatan warga dalam Musrenbangdes. Hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme Musrenbangdes sehingga usulan yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai dengan ruang lingkup perencanaan pembangunan desa. Selain itu, keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan menyebabkan tidak seluruh masyarakat dapat mengikuti forum musyawarah maupun kegiatan evaluasi pembangunan. Kondisi tersebut mengakibatkan

partisipasi masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki waktu dan akses lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyediaan forum partisipasi belum sepenuhnya menjamin keterlibatan masyarakat secara merata apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan strategi komunikasi yang lebih inklusif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Eko (2015) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, kapasitas masyarakat, serta dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik bahwa hambatan partisipasi di Desa Oro-Oro Ombo bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen pemerintah desa, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat, terutama tingkat pemahaman mengenai Musrenbangdes dan keterbatasan waktu untuk berpartisipasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan forum musyawarah, tetapi juga pada penguatan literasi masyarakat, perluasan akses informasi, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih fleksibel agar mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat merupakan hasil interaksi antara kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Keberhasilan Musrenbangdes tidak hanya bergantung pada tersedianya ruang partisipasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini mempertegas bahwa

penguatan tata kelola partisipatif di tingkat desa memerlukan keseimbangan antara komitmen pemerintah sebagai fasilitator pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan desa.

Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disintesis bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo telah berlangsung pada seluruh tahapan pembangunan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Namun demikian, kualitas partisipasi pada setiap tahapan menunjukkan tingkat yang berbeda. Partisipasi masyarakat relatif lebih kuat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dibandingkan pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah terlibat dalam kegiatan pembangunan yang bersifat langsung dan memberikan manfaat nyata dibandingkan dalam proses perencanaan yang membutuhkan pemahaman terhadap mekanisme administrasi dan kebijakan pembangunan desa.

Temuan tersebut sekaligus menjawab kesenjangan penelitian (research gap) yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menempatkan partisipasi masyarakat sebagai tingkat kehadiran dalam forum Musrenbangdes atau keterlibatan pada tahap perencanaan pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi perlu dipahami secara lebih komprehensif sebagai keterlibatan masyarakat pada seluruh siklus pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan demikian, efektivitas Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh banyaknya masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah, tetapi juga oleh kesinambungan

keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa kualitas partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh interaksi antara kapasitas kelembagaan pemerintah desa, modal sosial masyarakat, dan tingkat literasi masyarakat mengenai mekanisme Musrenbangdes. Temuan ini memperluas penerapan teori partisipasi Theresia Aprillia (2014) dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan partisipatif tidak hanya bergantung pada tersedianya ruang partisipasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa membangun komunikasi yang inklusif, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menciptakan kepercayaan terhadap proses pembangunan. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses kolaboratif yang dipengaruhi secara simultan oleh aspek kelembagaan, sosial, dan kapasitas masyarakat, bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah.

Implikasi penelitian ini bagi administrasi publik adalah perlunya penguatan tata kelola Musrenbangdes melalui peningkatan kualitas komunikasi publik, penyebaran informasi yang lebih merata, pengembangan kapasitas masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif. Upaya tersebut akan memperkuat prinsip good governance, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mendorong terwujudnya pembangunan desa yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu telah berlangsung pada seluruh tahapan pembangunan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta

pemanfaatan hasil pembangunan. Namun demikian, tingkat partisipasi pada setiap tahapan belum sepenuhnya merata. Masyarakat cenderung lebih aktif pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan melalui kegiatan gotong royong, pemanfaatan fasilitas umum, serta pemeliharaan hasil pembangunan, sedangkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses dan pemahaman lebih baik terhadap mekanisme Musrenbangdes.

Keberhasilan partisipasi masyarakat didukung oleh komitmen pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi, komunikasi dan sosialisasi yang baik, serta kuatnya budaya gotong royong sebagai modal sosial masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme Musrenbangdes menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan masyarakat secara optimal.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes tidak hanya ditentukan oleh tersedianya forum musyawarah, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan pemerintah desa, modal sosial masyarakat, dan tingkat literasi masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola pembangunan desa memerlukan strategi yang tidak hanya memperluas ruang partisipasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan komunikasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Musrenbangdes dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4),

216–224.

<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Burke, E. M. (2004). *Public Participation Strategies*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.